

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENGUATAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA

Maulidyah Indira Hasmarini, Didit Purnomo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: Maulidyah.Hasmarini@ums.ac.id,

dp274@ums.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyse the role of the community in Strengthening 'Lumbung Pangan Masyarakat Desa'. 'Lumbung Pangan Masyarakat Desa' is a village institution which can be utilized by farmers to improve their welfare and existence. However, in the process of strengthening it, the role of existing stakeholders (academics, community leaders, government and businessmen) is much needed. The method used in this research are the focus group discussions (FGD) technique and in-depth interview, as well as quantitative analysis in order to achieve the research's expected results. The activities carried out in this research is conducting an initial survey in the sample area to obtain preliminary data on the characteristics and condition of food security in the research area; as well as mapping the potential and the role of 'Lumbung Pangan Masyarakat Desa' in community empowerment. Afterwards, conducting the research and analysis based on the initial survey findings. The results showed that the role of stakeholders (A-B-G-C) was instrumental in strengthening farmers' institutional (in this case the 'Lumbung Pangan Masyarakat Desa'), particularly the role of community leaders. Besides the aspects of economic and social also decisive in strengthening the institution. It then became the justification for formulating the form of empowerment for farmers and farmer groups through 'Lumbung Pangan Masyarakat Desa'. In addition, the empowerment model is expected to be the social engine for the farmers and institutions in rural areas, especially in realizing the achievement of food security.

Keywords: *food security, community development, 'lumbung pangan'*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Di sisi lain, mengabaikan ketahanan pangan berarti membiarkan rendahnya kualitas SDM. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan tertuang pada undang-undang (UU) no.7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.68 tentang Ketahanan Pangan, dimana ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Ariani, 2007).

Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, terutama di Pulau Jawa dan sebagian besar

matapencahariannya berada di sektor pertanian. Sektor pertanian, meskipun cenderung semakin menurun peranannya, namun masih memberikan kontribusi terbesar bagi ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kesejahteraan harus secara efektif dan terfokus diarahkan kepada penduduk di daerah pedesaan, terutama kepada masyarakat petani. Salah satu isu strategis kebijakan peningkatan kesejahteraan adalah melalui pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan khususnya, di daerah pedesaan. Sehingga menjadi suatu keharusan untuk mengkaji model pemberdayaan masyarakat yang tepat dan efektif dalam mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di pedesaan (Darwis dan Rusastra, 2011).

Keberadaan lumbung pangan dikenal oleh masyarakat sebagai cadangan pangan di pedesaan dan berfungsi sebagai stok selama masa paceklik. Keadaan ini sangat penting untuk

daerah berkarakteristik pertanian tadah hujan, lahan pertanian pangan, yang hanya dapat berproduksi optimal pada musim hujan saja. Sehingga, kelestarian lumbung pangan diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, walaupun dalam skala kecil. Pemerintah dalam hal ini melalui Keputusan Mendagri dan otonomi daerah No: 6 tahun 2001 memutuskan bahwa Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga milik rakyat desa/kelurahan yang bergerak di bidang pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat (keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 6 tahun 2001).

Fenomena lumbung desa telah lama dikenal sebagai institusi cadangan pangan di pedesaan dan sebagai penolong petani di masa paceklik. Namun, keberadaan institusi atau lembaga tersebut, yang sebetulnya hidup dan dipelihara turun-temurun itu lenyap ditelan waktu. Untuk mengembangkan lumbung pangan modern, yang penting bukan cuma institusi fisik, tapi juga soal manajemennya. Intinya, pengelolaan lumbung pangan modern menyangkut tiga hal penting, yaitu pengelolaan risiko, bursa komoditas, dan prinsip saling kepercayaan. Lumbung pangan itu bukan hanya untuk mengelola komoditas yang punya daya simpan panjang seperti beras dan kopi atau biji-bijian, tapi juga komoditas yang mudah dan cepat busuk seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dengan penerapan *warehouse receipt system* dan pergudangan yang canggih, petani dapat lebih terjamin pendapatannya. Petani tidak khawatir harga jual komoditasnya anjlok karena rusak. Dengan lumbung pangan yang modern diharapkan cadangan pangan masyarakat menjadi lebih terjamin (Soemarno, 2010).

Sampai pada saat ini, di wilayah kabupaten Wonogiri merupakan daerah pedesaan yang banyak tersedia tenaga kerja untuk mengolah lahan pertanian mereka. Namun, di sisi lain, banyak tenaga kerja pedesaan yang lebih suka 'boro' ke daerah lain, bahkan ke luar negeri untuk bekerja dengan harapan akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada 'hanya sekedar' mengolah lahan pertanian di daerah asalnya.

Pada fokus penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa kurangnya pemberdayaan masyarakat dan peran kelembagaan petani merupakan penyebab turunnya atau berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Dalam konteks penelitian ini, 'lemahnya' pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan petani, terutama ***Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)*** terhadap tercapainya ketahanan pangan, akan menjadi perhatian dan kajian pembahasan.

Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau *social interplay* dalam suatu komunitas. Pemahaman terhadap konsep lembaga atau kelembagaan (institusi) sejauh ini lebih terpaku pada organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi nonformal. Dalam konteks kelembagaan pertanian, pemahaman terminologi "lokal" diinterpretasikan sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik tersendiri yang berkaitan dengan kondisi setempat. Terminologi "lokal" meliputi dasar-dasar untuk melakukan tindak kolektif, energi untuk melakukan konsensus, koordinasi tanggung jawab; serta menghimpun, menganalisis dan mengkaji informasi. Hal-hal ini tidak terjadi secara otomatis, namun memerlukan kehadiran institusi yang bersifat spesifik lokasi (Suradisastira, 2008).

Ada empat komponen kelembagaan yang dapat digunakan dalam konsep pembangunan partisipatif, yaitu 1) *person* (orang), 2) kepentingan, 3) aturan, 4) struktur (Hadi, 2009).

2. METODE PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini adalah: (1) petani, yang tergabung dalam kelompok tani, dan (2) ketua kelompok tani, dan; (3) tokoh terkait. Metode persampelan yang digunakan adalah dengan metode tahapan berganda (*multi-stage sampling*) yakni dengan *cluster* dan *stratified sampling*. *Cluster* yang dipergunakan adalah dari sebaran geografis dari asal daerah responden (kecamatan). Unsur *stratified*-nya adalah didasarkan atas kelompok responden (TK, calon TK, *key-persons*). Responden dapat diperinci sebagai berikut: (1) petani, yaitu petani yang

tergabung dalam LPMD n= 10, (2) *key-persons* dari tokoh setempat di masing-masing daerah penelitian, meliputi n=10, dan (3) *key-persons* dari instansi terkait n=10.

Pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, *focus group discussion* (FGD), dan observasi partisipatif.

Ada tiga alat analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis kuantitatif:

a) statistik deskriptif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis persepsi responden seperti yang pernah digunakan oleh Susilowati (2002), Sudantoko (2010) dengan modifikasi seperlunya. Analisis persepsi responden ini adalah suatu kajian fenomena berdasarkan dari pendapat atau persepsi responden sebagai pelakunya. Persepsi responden akan diukur dengan skor nilai dengan skala konvensional (nilai 1-10). Penilaian dengan skala ini adalah sangat populer dan lazim dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat luas di Indonesia. Dengan menggunakan skala konvensional diharapkan jawaban responden akan mempunyai nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi (Susilowati, 2001).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peta Kondisi Ketahanan Pangan dari Aspek Ketersediaan

Aspek ketersediaan ketahanan pangan daerah kantong migran di kabupaten Wonogiri berdasarkan kajian dan evaluasi Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan dalam kondisi aman. Produksi Padi di kecamatan

b) *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan membuat keputusan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut (Saaty, 2008), Sudantoko (2010), Sumastuti (2015).

2. Analisis kualitatif

Dari hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan para responden (target) maka dapat digali informasi tentang profil atau karakter dari responden secara lebih mendalam dan lebih spesifik. Analisis kualitatif ini banyak direkomendasikan oleh para antropolog atau sosiolog untuk menggali lebih mendalam tentang karakter seseorang terhadap nilai-nilai tertentu yang akan dicari.

3. Analisis pengembangan model

Curah pikir (*brainstorming*) dan diskusi dengan para *stakeholders* (pihak-pihak terkait) akan digunakan sebagai salah satu sarana/ media untuk merumuskan model (manajemen dan/ atau bimbingan) atau pola yang dikembangkan dalam kajian ini.

Baturetno, yang dilaporkan Wonogiri Dalam Angka tahun sebesar 8,058, kemudian jagung 11,272, ubi kayu sebesar 5,973 sehingga total produksinya adalah 25,303. Produksi bersih dalam setahun diketahui sebesar 1,219 sehingga rasio konsumsinya 0.25, dan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan di kecamatan Baturetno dinyatakan surplus tinggi.

Tabel 1. Kondisi Ketahanan Pangan di daerah Kantong Migran

N o	Kecamatan	Padi 2010-10	Jagung 2010-10	Ubi 2010-10	Produksi Total	Populasi 2011	Produksi Bersih	Rasio Konsumsi	R_AV	IAV
1	Baturetno	8,058	11,272	5,973	25,303	56,861	1,219	0.25	Surplus tinggi	0.76
3	Wonogiri	5,662	9,969	19,626	35,257	93,511	1,033	0.29	Surplus tinggi	0.93

Sumber: Hasil Penelitian

Peran Masyarakat Desadalam Proses Pemberdayaan melalui Lumbung Pangan

Fenomena migrasi di kantong migran hingga pada tahun 2013 di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan. Ciri khas yang ditemukan pada petani keluarga migran, rata-rata berusia 46 tahun, usia tertua adalah 58 tahun dan yang paling muda adalah 30 tahun. Latar belakang pendidikan responden terendah adalah SMP dan tertinggi adalah universitas.

Karakteristik kantong migran lainnya adalah bahwa keluarga migran berdasarkan pekerjaannya adalah petani, pedagang, karyawan dan wiraswasta. Arus merantau atau boro ke luar daerah asal, motivasinya adalah ekonomi, yaitu untuk memperoleh modal. Setelah memperoleh modal, kemudian pulang ke daerah asal dan tidak menetap di perantauan. Secara umum tingkat migrasi keluarga migran saat penelitian ini cukup kecil, artinya untuk peluang pemberdayaan kelembagaan cukup besar.

Pemberdayaan kelembagaan di keduasampel penelitian dilakukan kepada lembaga Gapoktan, LPMD, LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), Kelompok Tani, Pemerintahan Desa, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.

Lembaga-lembaga seperti Gapoktan, LPMD, LDPM, Kelompok Tani, dibentuk untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi. Lembaga Gapoktan adalah lembaga yang dibentuk untuk memperoleh bantuan modal yang diperlukan oleh petani. LPMD dibentuk untuk membantu petani menampung hasil pertanian.

Kelembagaan dibawah binaan Dinas Pertanian dan kelembagaan dibawah binaan Dinas Ketahanan Pangan memiliki keterkaitan, membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Dinas Pertanian meningkatkan kesejahteraan petani melalui teknis bertani, sementara dinas Ketahanan Pangan meningkatkan kesejahteraan melalui pencapaian ketahanan pangan.

Dinas Pertanian sebagai lembaga pemerintah melakukan upaya melalui kegiatan petugas PPL dilapangan memberikan penyuluhan mengenai teknik bertanam yang dapat memaksimalkan hasil

produksi pertanian. Teknik bertanam yang disosialisasikan adalah teknik menanam padi, yaitu teknik “*Jejer Legowo*”. Teknik “*Jejer Legowo*” adalah teknik menanam padi dengan ukuran 20-20, 40. Petani diharapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan lahan dengan hasil produksi yang lebih besar, dengan teknik “*Jejer Legowo*” tersebut. Prinsip kerja sistem *jajar legowo* adalah meningkatkan populasi tanaman padi dengan mengatur jarak tanam sehingga pertanaman memiliki barisan tanaman yang diselingi barisan kosong, di mana jarak tanam pada barisan pinggir setengah kali jarak tanam antar barisan.

Sistem tanam jajar legowo juga merupakan suatu strategi memanipulasi lokasi pertanaman sehingga pertanaman memiliki jumlah tanaman pinggir yang lebih banyak dengan adanya barisan kosong. Tanaman padi yang berada dipinggir memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibanding tanaman padi yang berada di barisan tengah sehingga memberikan hasil produksi dan kualitas gabah yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan tanaman yang ada dipinggir dapat memperoleh intensitas sinar matahari yang lebih banyak (efek tanaman pinggir). Penerapan sistem tanam jajar legowo akan memberikan hasil maksimal dengan memperhatikan arah barisan tanaman dan arah datangnya sinar matahari. Lajur barisan tanaman disusun menghadap arah matahari terbit agar seluruh barisan tanaman pinggir dapat memperoleh intensitas sinar matahari yang optimum. Dengan demikian tidak ada barisan tanaman terutama tanaman pinggir yang terhalangi oleh tanaman lain dalam mendapatkan sinar matahari.

Penyuluhan yang dilakukan PPL berdasarkan hasil wawancara di atas, dinyatakan memberikan peningkatan hasil. Upaya Dinas Pertanian dalam memberikan pelatihan secara teknis kepada petani melalui Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan, ataupun lembaga masyarakat petani lainnya dapat memberikan harapan baik bagi petani.

Dinas ketahanan pangan melakukan pemberdayaan kelembagaan melalui lembaga LPMD. Pemberdayaan kelembagaan melalui lembaga LPMD dilakukan untuk membantu kesulitan yang dihadapi petani pra tanam hingga pasca panen.

Hasil FGD diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan yang dilakukan adalah melalui ketokohan seseorang untuk menjadi pengurus kelembagaan sehingga dapat memberikan semangat dan motivasi kepada petani untuk memanfaatkan lahan secara maksimal, mengkomunikasikan inovasi teknik pertanian, diversifikasi tanaman pangan di atas lahan, melatih petani dalam penyiapan lahan dengan pupuk semi organik yaitu mikroba, menyelenggarakan sarasehan lembaga pertanian secara rutin.

Temuan penelitian yang menarik adalah kehadiran bapak Kukuh yang mengajak anggota LPMD untuk aktif mengelola pertanian. Ketokohan dan peran bapak Kukuh dalam pemberdayaan kelembagaan diantaranya memaksimalkan LPMD yang ada di kecamatan Baturetno. Praktis yang dilakukan adalah menggerakkan semua anggota LPMD untuk aktif dalam mengelola tanah pertanian. Petani yang mengalami kesulitan dalam proses produksi diberikan stimulan penyelesaian kendala. Kendala yang sering diselesaikan bapak Kukuh adalah dengan memberikan bantuan fasilitas yang dibutuhkan petani seperti bantuan dana yang direalisasikan langsung dalam bentuk barang siap pakai. Jadi bapak kukuh tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun diberikan berupa bahan-bahan yang diperlukan dalam mengelola lahan pertanian. Proses pembayaran dilakukan ketika petani sudah panen. Bapak Kukuh sendiri sebenarnya bukan warga kelahiran di Kecamatan Baturetno, melainkan pendatang yang berasal dari Solo. Motivasi untuk memberdayakan masyarakat dalam memaksimalkan hasil produksi pertanian melalui kelembagaan adalah agar potensi pertanian di

Kecamatan Baturetno meningkat. Harapan bapak Kukuh, dengan adanya peningkatan hasil produksi adalah untuk mengurangi minat migran masyarakat di kecamatan Baturetno, serta untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan di Kecamatan Baturetno.

Tokoh lain yang muncul adalah Bapak Sutarman yang dikenal sebagai tokoh karena diangkat warga untuk menjadi Ketua RT. Selain dikenal sebagai ketua RT, Bapak Sutarman juga menjadi ketua LPMD yang terletak di desa kelompok tani di desa Kedungrejo kecamatan Baturetno. Peran Bapak Sutarmandalam pemberdayaan kelembagaan, adalah menggerakkan anggota LPMD untuk menanam padi dengan teknik *Jejer Legowo*. Himbauan kepada anggota LPMD untuk menggunakan teknik Jejer Legowo diimplementasikan sendiri dengan langsung menerapkan teknik tersebut di lahan pertanian miliknya. Bapak Sutarman memberitahukan kelebihan teknik Jejer Legowo berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Hasil tanaman padi dengan teknik tersebut ternyata mampu menghasilkan lebih banyak produksi padi. Motivasi Bapak Sutarman untuk memberdayakan anggota LPMD tersebut adalah agar kehidupan warga masyarakat dilingkungan sekitarnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Gerakan pemberdayaan lain yang dilakukan oleh Bapak Sutarman adalah dengan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan *Greenbelt* di sekitar Waduk Gajah Mungkur pada saat air surut. Pemanfaatan lahan tersebut mendapat tanggapan masyarakat sehingga lahan *Greenbelt* dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produksi pertanian.

Pengukuran karakteristik kantong migran dalam rangka keberdayaan masyarakat melalui kelembagaan, dikonfirmasi secara kuantitatif menggunakan kuesioner dengan skala konvensional. Berdasarkan hasil penelitian diketahui karakter tingkat keberdayaan kelembagaan di kantong migran.

Tabel 2. Tingkat keberdayaan di kantong migran

No.	Kecamatan	Indikator Pemberdayaan Masyarakat dalam kelembagaan	Skor (1-10)	Tingkat keberdayaan
1	Wonogiri	Akses informasi, modal, dan pemasaran	23	Rendah

		Keberadaan lembaga tani		
		Peran tokoh dan <i>stakeholder</i>		
		Pelatihan dan Pendampingan		
		Keterlibatan Petani		
2	Baturetno	Akses informasi, modal, dan pemasaran	38	Tinggi
		Keberadaan lembaga tani		
		Peran tokoh dan <i>stakeholder</i>		
		Pelatihan dan Pendampingan		
		Keterlibatan Petani		

Sumber: Hasil Penelitian

Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui wadah *Lumbung Pangan Masyarakat Desa* dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Penyusunan strategi dalam studi ini dilakukan konfirmasi melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan FGD. Strategi pemberdayaan kelembagaan petani, Haryadi selaku Petugas Ketahanan Pangan menggaris-bawahi bahwa peran ketokohan merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi penggerak pemberdayaan kelembagaan. Artinya ketokohan merupakan *power engine*, dalam upaya memberdayakan kelembagaan. Keterangan tersebut diperkuat oleh petugas PPL kecamatan Wonogiri, bapak Riyanto (45 th), yang mengungkapkan bahwa petani di daerah masih terbiasa dengan pola-pola tradisional. Kebiasaan bertani yang sudah turun-tumurun, menurutnya sulit untuk diubah. Inisiatif yang digunakan para petugas PPL kemudian adalah dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Harapannya, dengan kehadiran tokoh tersebut, dapat membantu mengarahkan petani untuk meningkatkan produksi pertanian, dan memberdayakan lembaga petani yang sudah ada. Pada kesempatan wawancara dengan sumber lain, bapak Kukuh (petugas PPL kecamatan Baturetno), diuraikan dengan jelas kesulitan yang terjadi ketika mengajak partisipasi tokoh masyarakat terlibat dalam pemberdayaan kelembagaan petani.

Mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah mendarahdaging menurut bapak Kukuh tidak mudah. Pendekatan yang digunakan untuk menggerakkan kelembagaan adalah dengan mengajak peran aktif seorang

tokoh masyarakat. Namun demikian, kehadiran tokoh saja ternyata tidak cukup, sehingga harus tetap melakukan pendampingan dan penyuluhan. Kehadiran tokoh, bapak Sutarman baru berhasil menggerakkan lembaga ketika panen yang diperoleh tokoh berlipat. Kondisi tersebut hampir sama dengan yang dialami oleh Bapak Kukuh. Bapak Sutarman dan bapak Kukuh, adalah pengurus LPDM di desa Gambiranom kecamatan Baturetno. Namun fenomena yang dialami keduanya berbeda. Ketokohan bapak Sutarman, digunakan untuk menggerakkan petani dalam teknis pertanian, sementara bapak Kukuh menggerakkan petani untuk memaksimalkan upaya pemanfaatan lahan mulai dari pengolahan hingga mendistribusikan hasil pertanian.

Penjelasan di atas, diperkuat dari hasil FGD yang menyimpulkan bahwa peran ketokohan seseorang dalam masyarakat sangat penting. FGD mendiskusikan upaya pemberdayaan kelembagaan petani. Pada forum tersebut sempat terjadi argumentasi, bahwa ketokohan masyarakat sulit digunakan untuk menjadi penggerak lembaga petani. Alasan yang dikemukakan adalah banyak yang dianggap tokoh, namun tidak serta merta masyarakat akan mengikuti himbuan sang tokoh. Argumentasi tersebut dikaji secara mendalam hingga akhirnya FGD menyimpulkan ketokohan merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk menggerakkan masyarakat, dengan catatan tokoh tersebut memiliki kedisiplinan dan ketegasan untuk mengajak anggota tani menuju perubahan yang lebih baik.

Proses pemberdayaan dipengaruhi ketokohan seseorang dalam kelembagaan sehingga dapat memberikan semangat dan

motivasi kepada petani. Selain itu, para pemangku kepentingan, akademik dan industri memegang peran penting dalam memberikan perubahan yang baik terhadap proses pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Hasil temuan penelitian menunjukkan, daerah kantong *migrant* dengan tingkat pemberdayaan rendah adalah kecamatan Wonogiri, sedangkan untuk tingkat pemberdayaan tinggi adalah Baturetno. Berdasar kondisi tersebut, penelitian ini mengusulkan perlunya penguatan pemberdayaan kelembagaan petani dengan 2 skenario, mengacu pada komponen dan indikator kelembagaan..

Scenario pertama, tingkat pemberdayaan kelembagaan petani tinggi. Kondisi tersebut didasarkan pencapaian komponen indikator kelembagaan yang ada. Penguatan kelembagaan petani yang diusulkan adalah Pola Pemberdayaan dengan Pendampingan. Pola pemberdayaan dengan pendampingan diawali ketika kelompok tani kesulitan dari hasil produksinya. Maka pola pendampingan dengan *stakeholder* (akademik, pemerintah diwakili kantor ketahanan pangan dan BUMN Bulog, kelompok tani) menjembatani kesulitan mendistribusikan hasil produksi pertanian. Pola pemberdayaan dengan pendampingan, memberikan hasil, tercapainya legalitas pemasokan hasil produksi pertanian kepada bulog, sebagaimana standart yang telah ditetapkan oleh Bulog.

Upaya menambah peningkatan hasil produksi pertanian melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat diharapkan dapat terjadi pergerakan perubahan tambahan ketersediaan hasil produksi pertanian dari barang yang dapat dijual oleh petani. Perubahan hasil produksi ini berdampak pada perubahan harga jual hasil produksi pertanian. Perubahan harga tersebut memerlukan peran pemerintah untuk menetapkan kebijakan harga dalam bentuk insentif harga dengan menempatkan pemerintah sebagai “Tengkulak”. Secara teoritis, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi keputusan petani menjual hasil pertanian kepada para tengkulak. Partisipasi aktif pemerintah sebagai agen

“Tengkulak” dapat diimplementasikan melalui lembaga-lembaga petani yang sudah ada (Gapoktan, LPMD, dan LDPM). Bahkan pemerintah (melalui instansi terkait), dapat menjadi mediator pengelolaan hasil produksi pertanian oleh lembaga petani yang ada menjadi BUMD.

Scenario kedua, tingkat pemberdayaan kelembagaan petani rendah. Kondisi tersebut didasarkan pencapaian komponen indikator kelembagaan yang ada. Penguatan kelembagaan petani yang diusulkan adalah Pola Pemberdayaan dengan Standarisasi dan Pembinaan. Pola pemberdayaan dengan standarisasi dan pembinaan dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan ketrampilan pola tanam kepada petani sebagai standarisasi seperti pengolahan tanah sebelum masa tanam dengan pupuk organik. Petani dan Pengurus kelembagaan diberikan semangat dan motivasi serta dilatih oleh dinas ketahanan pangan dan *stakeholder* (akademik dan swasta) dalam penyiapan lahan dengan pupuk semi organik yaitu mikroba, menyelenggarakan sarasehan lembaga pertanian secara rutin. Hasil pola pemberdayaan dengan standarisasi dan pembinaan adalah adanya peningkatan kualitas produksi pertanian yang dapat memenuhi standar bulog.

4. KESIMPULAN

Partisipasi para petani (kelompok tani) berdasar kebutuhan local dan peran aktif tokoh setempat melalui wadah lumbung pangan masyarakat desa dapat memperkaya pola pemberdayaan. Selain itu, melalui pola pemberdayaan tersebut menjadi bentuk perubahan mandiri (*social engine*), bagi masyarakat petani dan kelembagaan di daerah, terutama dalam mewujudkan pencapaian ketahanan pangan.

Keberadaan lumbung pangan dapat dirasakan para petani, terutama anggota lumbung pangan masyarakat desa, baik secara ekonomis maupun non-ekonomis.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ariani, Mewa.,2007. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah untuk Mendukung

- Ketahanan Pangan Nasional. (*Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi (PSE) dan Kebijakan Pertanian*, Vol. (?), No. (?), 2007. www.pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/mono26/3/, diakses 9 Oktober 2011.
- Darwis dan Rusastra, 2011. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Sinergi Program Puap dengan Desa Mandiri Pangan *Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 9 No.2, Juni 2011, hlm.125-142*
- Hadi, Agus Purbathin. 2009. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*. Artikel. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA).
- Saaty, Thomas., 2008. Decision making with the Analytic Hierarchy Process. *Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008*
- Soemarno, 2010. Model Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD). <https://www.scribd.co>
- m/doc/201652333/Lumbung-Pangan-Masyarakat-Desa.
- Sumastuti, Efriyani, 2015. The Empowerment Strategy for The Food Crop Farmers in Anticipating The Climate Change. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.16 No.2, Desember 2015.*
- Suradisastra, Kedi. 2008. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani (Farmer's Institutional Empowerment Strategy). *Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26 No. 2, Desember 2008.*
- Susilowati, (2002). "Analisis partisipasi wanita dan istri nelayan dalam membangun komunitasnya (Studi kasus pada perkampungan nelayan di Kecamatan Wedung, Demak, Jawa Tengah)". *Media Ekonomi dan Bisnis, Vol. XIV, No.1 Juni.*
- Undang-undang (UU) no.7 tahun 1996 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.68 tentang Ketahanan Pangan